

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan penulisan ini untuk mengidentifikasi prosedur pembayaran gaji induk pada KPPN Padang dan mengetahui prosedur penolakan SPM gaji induk pada KPPN Padang. Berdasarkan dari hasil yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya di dapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Gaji Induk merupakan gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada pegawai negeri yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan pada Satker yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji
2. Prosedur pembayaran Gaji induk pada KPPN Padang dapat dilakukan dengan mengajukan SPM lalu akan diterbitkan SP2D lalu Bank operasional akan melakukan transferan ke rekening ke SATKER
3. Pada SPM Gaji induk ditandai dengan jenis SPM berkodekan 01, cara bayar diberi kode 2, jenis pembayaran diberi kode 1, sifat pembayaran diberi kode
4. Kolom uraian di isi dengan Uraian SPM Gaji Induk adalah Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk Bulan... Tahun... untuk ...Pegawai/ ...Jiwa sesuai SPP Nomor... Tanggal...

4. Penolakan SPM terjadi apabila ketidaklengkapan dokumen pendukung SPM, adanya kesalahan di dalam SPM seperti kesalahan penulisan akun ataupun uraian, kekurangan pagu, kegagalan pada saat unggah ADK atau ADK belum di inject, ataupun kesalahan format dokumen pendukung.

Prosedur pembayaran gaji induk diperlukan Satuan Kerja untuk mengetahui prosedur pembayaran gaji agar ketika memberikan data dan persyaratan kepada kantor KPPN Padang dapat diterima. Jika terdapat ketidaklengkapan dan kesalahan data maka KPPN akan mengembalikan SPM tersebut kepada Satuan Kerja bersangkutan yang akan mengakibatkan keterlambatan pembayaran gaji pada Satuan Kerja tersebut. Jadi diharapkan prosedur pembayaran gaji induk pada KPPN Padang dapat berjalan secara efektif dan efisien.

4.2 Saran

Saran yang dapat saya berikan adalah kepada Satuan Kerja diharapkan melengkapi dokumen dan mematuhi prosedur yang ditetapkan KPPN Padang agar tidak terjadi penolakan. Dan untuk KPPN Padang sebaiknya memberikan penyuluhan dan pembekalan pengetahuan yang lebih tentang KPPN terhadap public, karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang KPPN.